

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah adalah pihak yang diberikan mandat dalam mengelola keuangan daerah, memberikan pelayanan serta melakukan pembangunan. Sebagai pihak yang diberikan mandat dalam mengelola keuangan daerah perlu adanya transparansi serta akuntabilitas agar tercipta pemerintahan yang bersih dari tindakan menyimpang. Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan untuk menginformasikan data keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan dibuat untuk menginformasikan hal-hal yang dimuat dalam laporan keuangan kepada pihak yang membutuhkan, seperti *stakeholder* dan pihak yang berada diluar pemerintahan.

Tujuan dari penyampaian informasi keuangan untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat daerah, bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat, dan sebagai tolak ukur dalam membuat keputusan di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Informasi penting dalam laporan keuangan disampaikan kepada manajemen daerah (kepala daerah, kepala birokrasi kepala dinas dan bagian keuangan) bagian legislatif, kreditur dan masyarakat. Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama berkepentingan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai

kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan, serta informasi perencanaan dan penganggaran Nosihana and Yaya (2016).

Adanya UU No. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik memerintahkan kepada pejabat publik agar lebih terbuka, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi keuangan serta mengutamakan pelayanan publik, sudah sepantasnya pemerintah daerah mempublikasikan informasi keuangannya kepada publik atas wujud dari tanggung jawabnya terhadap wewenang yang diberikan dan keterbukaan informasi pemerintah daerah. Bentuk transparansi informasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menyediakan informasi yang mudah diakses penduduk dan para pengguna laporan keuangan lainnya. Transparansi tersebut diperlukan guna mencegah tindakan merugikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seperti manipulasi ataupun penyalahgunaan wewenang dalam penyajian informasi kepada publik. Akan ada sanksi administratif kepada pejabat publik jika membatasi hak yang seharusnya didapat oleh publik berupa informasi publik. Sanksi administratif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan melalui website sebagai salah satu perwujudan *e-government* terus dikembangkan di Indonesia, terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan integrasi dan efisiensi manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat dan sebagai upaya menciptakan *good and clean governance*.

Terkait dengan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah, Instruksi Mendagri No. 188/52/1797/SJ/2012 menginstruksikan kepada gubernur, walikota, serta bupati seluruh Indonesia agar mencantumkan menu di situs resmi pemerintah daerahnya masing-masing dengan judul “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)” berisikan dua belas dokumen pengelolaan anggaran. Dokumen pengelolaan anggaran yang dicantumkan pada instruksi tersebut yaitu: (a) Ringkasan RKA SKPD; (b) Ringkasan RKP PPKD; (c) Rancangan Peraturan Daerah APBD; (d) Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD; (e) Peraturan Daerah APBD; (f) Peraturan Daerah Perubahan APBD; (g) Ringkasan DPA SKPD; (h) Ringkasan DPA PPKD; (i) LRA SKPD; (j) LRA PPKD; (k) LKPD yang sudah diaudit; dan (l) Opini BPK mengenai LKPD.

Sekretaris Nasional FITRA (2021) mengeluarkan Survei Keterbukaan Anggaran (*Open Budget Survey*) yang menyatakan bahwa indeks keterbukaan anggaran Indonesia tahun 2022 mendapat skor 70 dari 100 poin, yang artinya mengalami kenaikan setelah survey dua tahun sebelumnya mendapat skor 64 (<https://seknasfitra.org>). Namun faktanya berdasar laporan *Corruption Perceptions Index* tahun 2021 Negara Indonesia justru menduduki peringkat 102

atas 180 negara yang diuji, yang mana hal ini menunjukkan penurunan sebesar 17 tingkat dari pengujian sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dengan peringkat 85 dari 180 negara yang diuji (*Transparency International, 2021*). Kondisi ini menunjukkan masih dibutuhkannya upaya pemerintah daerah yang lebih ekstra dalam meningkatkan kualitas transparansi informasi keuangannya guna meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas publik.

Tabel 1.1
Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada *website* resmi pemerintah kabupaten di Pulau Jawa

| No | Provinsi | Daerah Otonom | Tidak Memiliki <i>Website</i> | Melaporkan LKPD Secara Lengkap | Melaporkan LKPD Secara Tidak Lengkap |
|----|----------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Jawa Timur | 29 | - | 11 | 18 |
| 2 | Jawa Barat | 18 | - | 7 | 11 |
| 3 | Jawa Tengah | 29 | - | 9 | 20 |
| 4 | DKI Jakarta | 1 | - | 1 | - |
| 5 | D.I Yogyakarta | 4 | - | 3 | 1 |
| 6 | Banten | 4 | - | 4 | - |
| | Jumlah | 85 | - | 35 | 50 |
| | Presentase | 100% | - | 41% | 59% |

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Diketahui dari hasil observasi pada Tabel 1.1 yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022, sebesar 41 persen dari pemerintah kabupaten di Pulau Jawa telah melaksanakan transparansi dalam mengelola anggaran daerahnya seperti yang diinstruksikan dalam Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012. Namun, meskipun hampir semua pemerintah kabupaten di Pulau Jawa memiliki *website* resmi untuk mengunduh dokumen keuangan dan kinerja pemerintah daerah, tetapi terkadang *website* tersebut tidak ada isinya, dokumen yang dimuat

tidak lengkap, dan tidak selalu mempublikasikan laporan keuangan setiap tahunnya.

Terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah. (Mutiha, 2017) meneliti bahwa derajat desentralisasi suatu pemerintah daerah memengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Sedangkan (Azis *and* Hapsari, 2020) dan (Anthony Putra *and* Syofyan, 2020) menemukan bahwa ukuran suatu pemerintah daerah juga berpengaruh secara signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Selain itu, opini audit juga memiliki pengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah (Pontoh *et al.*, 2018).

Penelitian ini menggunakan sampel Pemda yang terletak di pulau Jawa. Pulau Jawa dipilih karena memiliki jumlah penduduk yang besar jika dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia. Data yang diambil dari *website* Kemendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada 6 provinsi di Pulau Jawa mencapai 154,34 juta jiwa pada Juni 2022. Dengan kepadatan 1.317 jiwa/km², juga menjadi salah satu pulau di dunia yang paling dipadati penduduk (<https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa>).

Pemda dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi juga memiliki jumlah media massa yang lebih banyak dengan tingkat tekanan pers yang semakin besar sehingga akan meningkatkan pengungkapan informasi akuntansi untuk memenuhi permintaan informasi dari pers. Hal tersebut memungkinkan

bahwa pelaporan keuangan di internet secara sukarela akan lebih banyak dipraktikkan pada daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Laswad, Fisher and Oyelere (2005) dalam penelitiannya menunjukkan fakta bahwa pemakaian dan akses internet di daerah tujuan urbanisasi lebih tinggi. Hal tersebut memungkinkan bahwa pelaporan keuangan di internet secara sukarela akan lebih banyak dipraktikkan pada daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Tabel 1.2
Daerah dengan anggaran pendapatan pada APBD provinsi terbesar di Indonesia 2021

| Rincian Provinsi dengan Pendapatan Terbesar di Indonesia TA 2021 | | |
|--|------------------|-------------------------|
| No. | Provinsi | Total Pendapatan Daerah |
| 1 | DKI Jakarta | Rp 72,18 triliun |
| 2 | Jawa Barat | Rp 41,47 triliun |
| 3 | Jawa Timur | Rp 31,2 triliun |
| 4 | Jawa Tengah | Rp 26,7 triliun |
| 5 | Papua | Rp 14,7 triliun |
| 6 | Aceh | Rp 13,8 triliun |
| 7 | Sumatera Barat | Rp 13,5 triliun |
| 8 | Banten | Rp 11,6 triliun |
| 9 | Sulawesi Selatan | Rp 10,7 triliun |
| 10 | Sumatera Selatan | Rp 10,2 triliun |

Sumber: <https://money.kompas.com/>

Selain itu 5 provinsi yang ada di pulau Jawa merupakan Provinsi dengan pendapatan daerah terbesar di Indonesia. Provinsi yang dimaksud yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten. Pada Tabel 1.2 ditunjukkan bahwa Pulau Jawa merupakan pulau yang memperoleh Dana Bagi Hasil terbesar di Indonesia yaitu sebesar 66,60%. Dengan begitu diharapkan

pemerintah daerah khususnya di Pulau Jawa lebih transparan tentang laporan keuangannya guna menghindari dugaan negatif dari masyarakat.

Pemerintah daerah dapat melakukan transparansi laporan keuangannya melalui internet, dengan adanya pendapatan yang besar serta pulau di Indonesia yang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) paling banyak diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Pulau Jawa memiliki website yang lebih canggih guna untuk melaksanakan pelayanan publik dengan sistem yang memadai. Pernyataan ini cocok dengan penelitian Priyastiwi and Saputra (2019) dan Firly, Diana and Mawardi (2019) yang mengungkapkan bahwa semakin besar derajat desentralisasi, akan mendorong pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan pemda melalui internet.

Tabel 1.3

Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021

| Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil TA 2021 | | | | |
|---|------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| (dalam ribuan rupiah) | | | | |
| No | Pulau | Jumlah Provinsi | Total Dana Bagi Hasil TA 2021 | Presentase |
| 1 | Jawa | 6 | 20,250,903,597 | 66.60% |
| 2 | Kalimantan | 5 | 3,564,474,504 | 11.72% |
| 3 | Papua | 2 | 974,044,263 | 3.20% |
| 4 | Sulawesi | 6 | 741,937,522 | 2.44% |
| 5 | Sumatera | 10 | 4,001,195,820 | 13.16% |
| 6 | Bali | 3 | 660,119,779 | 2.17% |
| 7 | Maluku | 2 | 215,035,033 | 0.71% |
| | Jumlah | 34 | 30,407,710,518 | 100% |

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Teori keagenan menjadi teori yang melandasi penelitian ini. Pengertian teori keagenan yaitu bentuk interaksi diantara dua pihak ataupun lebih yang

dalam hubungan itu terdapat pihak selaku agen dan pihak yang lainnya selaku prinsipal (Masra *and* Sari, 2020). Kedua pihak tersebut kemudian melakukan kesepakatan dimana agen menyerahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada prinsipal untuk kepentingan pengambilan keputusan Anthony Putra *and* Syofyan (2020). Teori keagenan ini juga dapat di lihat pada sistem pemerintahan Indonesia. Pada sistem pemerintahan daerah, masyarakat bertindak sebagai *prinsipal* yang melimpahkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah selaku agen untuk mengelola pemerintahannya. Lalu, pemerintah daerah selaku agen wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada publik dalam wujud laporan keuangan.

Signalling theory diartikan sebagai teori yang menerangkan tentang keharusan lembaga pemerintah untuk menyebarkan sinyal baik kepada masyarakat guna mengurangi asimetri informasi. Yang dimaksud sinyal baik adalah adanya keterbukaan mengenai laporan keuangan yang bermutu, sistem pengendalian internal yang andal, dan pelaporan informasi yang lebih rinci sebagai bentuk pertanggungjawabannya masyarakat Anthony Putra *and* Syofyan (2020), dengan begitu masyarakat akan kembali memberikan sinyal yang baik untuk mendukung kinerja pemerintah dalam membangun negara. Pengungkapan laporan keuangan melalui *website* merupakan metode yang tepat digunakan untuk mempertanggungjawabkan informasi keuangan pada publik dengan cara yang cukup efektif dan tidak memakan banyak biaya.

Penyajian informasi keuangan dengan perantara internet adalah cara perusahaan atau pemerintah untuk menyebarluaskan atau mempublikasikan

informasi keuangannya kepada publik melalui internet (Sukmadilaga *et al.*, 2019: 2). *Website* termasuk kategori pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), bukan dikarenakan muatan pengungkapannya melainkan karena media penyampaiannya. (Anthony Putra *and* Syofyan, 2020) mendefinisikan sebagai suatu kondisi ketika suatu pemerintahan menyediakan hal-hal berikut dalam *website* pemerintahan: (1) satu set laporan keuangan komprehensif (termasuk *footnote* beserta laporan auditor), (2) terdapat tautan ke laporan tahunan, dan (3) terdapat tautan ke badan keuangan pemerintah.

Terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah, di antaranya derajat desentralisasi, ukuran daerah, dan opini audit.

Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah, dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, (Priyastiwati *and* Saputra, 2019) mengemukakan bahwa semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi sendiri didefinisikan sebagai sumber-sumber pemasukan pemerintah daerah yang legal dalam memenuhi belanja pada suatu daerah (Azis *and* Hapsari, 2020). Derajat desentralisasi juga dapat digunakan sebagai parameter yang mengukur performa pmda. Pemerintah daerah dengan derajat desentralisasi yang tinggi menandakan bahwa prestasi yang dicapai pada daerah tersebut sudah baik, dan sebaliknya. Pemerintah yang dapat mengelola keuangannya dengan baik akan

menyampaikan informasi keuangannya kepada publik dengan menggunakan teknik penyampaian yang lebih baik pula agar masyarakat selalu mendukung perkembangan kinerja pemerintah sehingga kegiatan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Pernyataan ini cocok dengan penelitian (Priyastiwi *and* Saputra, 2019) dan (Firly, Diana *and* Mawardi, 2019) yang mengungkapkan bahwa semakin besar derajat desentralisasi, akan mendorong pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan pemda melalui internet. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Moehardiono *and* Yuliati (2021) dan Mutiha (2017) tidak dapat menunjukkan hubungan keduanya.

Selain derajat desentralisasi, ukuran pemda juga diduga dapat memengaruhi kelengkapan pengungkapan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah diartikan sebagai skala yang menggambarkan seberapa besar ataupun kecil suatu pemerintah daerah. Variabel yang dapat merepresentasikan ukuran pemerintahan adalah total aset. Aset dapat menggambarkan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah atas perolehan dari kejadian di masa lalu serta darimana manfaat ekonomi pada masa depan diharap untuk didapatkan. Pemda yang mempunyai ukuran/total aset yang lebih banyak cenderung lebih ketat saat mengelola dan menjaga asetnya. Dengan begitu ukuran atau total aset pemerintah daerah yang besar menyebabkan pemerintah daerah cenderung akan mempublikasikan informasi keuangan pemerintah daerahnya Masra *and* Sari (2020). Sebaliknya, menurut penelitian Moehardiono *and* Yuliati (2021), Anthony Putra *and* Syofyan (2020) dan Masra

and Sari (2020) tidak menunjukkan pengaruh positif antara ukuran pemerintah dengan kelengkapan pengungkapan melalui *website* resmi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Setelah memeriksa kewajaran informasi yang disediakan dalam laporan keuangan, auditor BPK mengeluarkan pernyataan atas hasil pemeriksaan yang dinamakan opini audit Hapsari *et al.* (2020). Pemda dengan perolehan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) cenderung mengungkapkan laporan keuangannya melalui media internet guna membuktikan mutu atas pengelolaan laporan keuangannya yang baik serta bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan opini audit di luar WTP akan memunculkan kesan buruk dari publik mengenai adanya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah, alhasil pemerintah cenderung tidak mengungkap laporan keuangannya. Pernyataan ini didukung oleh riset yang diteliti Moehardiono and Yuliati (2021) serta Lesmanawati (2019) dengan hasil pemerintah daerah dengan opini WTP menunjukkan bahwa mereka mempunyai kemampuan yang lebih cakap dalam mengelola laporan keuangannya. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Nosihana and Yaya (2016) dan Lesmanawati (2019) tidak dapat menunjukkan hubungan keduanya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk menggali bukti empiris tentang beberapa faktor yang menjadi pengaruh atas pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Penelitian Heriningsih (2013) mengenai pengaruh opini audit dan ukuran pemerintah daerah terhadap kelengkapan pengungkapan melalui *website* resmi pemerintah daerah menunjukkan bahwa

tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran pemerintah daerah dan opini audit terhadap kelengkapan pengungkapan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nosihana *and* Yaya (2016) menemukan bukti bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan melalui *website* resmi pemerintah daerah, sedangkan opini audit tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan melalui *website* resmi pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian terdahulu masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan modifikasi atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian Azis *and* Hapsari (2020) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Derajat desentralisasi, Belanja Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2018)”, dengan menggunakan variabel ukuran pemerintah daerah, derajat desentralisasi, dan belanja daerah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni dengan menambahkan variabel opini audit.

Yang menjadi motivasi dalam penelitian ini adalah karena adanya ketimpangan antara banyaknya pengguna internet khususnya di wilayah Pulau Jawa dengan pengungkapan melalui *website* resmi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten di Pulau Jawa yang masih belum menyeluruh. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemerintah daerah tidak melakukan kelengkapan pengungkapan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet masih jarang diteliti pada lingkup pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menambah literatur tentang pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Derajat Desentralisasi, Ukuran Pemerintah Daerah dan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten di Pulau Jawa)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Jawa?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Jawa?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap hubungan Derajat Desentralisasi dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Jawa?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap hubungan ukuran pemerintah daerah dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Jawa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh derajat desentralisasi terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Jawa.
2. Mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Jawa.
3. Mengetahui apakah opini audit memoderasi pengaruh derajat desentralisasi terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Jawa.
4. Mengetahui apakah opini audit memoderasi pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten di Pulau Jawa.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah melalui internet, serta memberi kemudahan akses bagi masyarakat terkait informasi keuangan di situs resmi pemerintahan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan dapat mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah melalui media internet. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam mengakses laporan keuangan guna mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai transparansi laporan keuangan pada lembaga pemerintahan serta memperkaya informasi dan literatur yang berkaitan dengan pengungkapan laporan keuangan dengan internet beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman, masukan, dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah.

5. Bagi Universitas

Mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya serta dapat meningkatkan reputasi kampus dari penelitian yang dilakukan.

1.5. Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan proposal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, teori dan penelitian terdahulu, serta sistematika penyusunan proposal, semuanya tercakup dalam bagian ini.

BAB II Penelitian dan Perumusan Hipotesis. Teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian semuanya tercakup dalam bagian ini.

BAB III Metode Penelitian. Populasi dan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, definisi operasional variabel, metodologi pengukuran dan analisis data variabel, dan pengujian hipotesis semuanya tercakup dalam bagian ini.

BAB IV Gambaran Subyek dan Analisis Data. Pada bab ini berisikan tentang gambaran subyek penelitian analisis data dan pembahasan.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.